

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN KAS PADA PT POS INDONESIA (PERSERO) CABANG BONE

Rini Adriani^{1*}, Muhammad Idrus², Mursakin³

^{1,2,3}Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapi, Bone

E-mail: riniadriani7481@gmail.com ^{1*}, muhammadidrus425@gmail.com², mursakinsape@yahoo.com³

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel

Received: 12/01/2024

Revised: 14/02/2024

Accepted: 01/03/2024

Keywords: Internal control; Cash receipts

Kata Kunci: Pengendalian Internal; Penerimaan Kas

ABSTRACT

Research Objective To determine the application of the internal control system of cash receipts at PT Pos Indonesia (Persero) Bone Branch. This research uses a qualitative descriptive type, namely research that aims to describe, summarize various conditions, various situations, or various phenomena of social reality that exist in society that are the object of research, and try to draw that reality to the surface as a character, character, nature, model, sign, or picture of certain conditions, situations, or phenomena. Research results 1) The procedure for receiving cash at PT Pos Indonesia (Persero) Bone Branch is quite good, it can be seen from every occurrence of transactions immediately bookkeeping. 2) Internal cash control efforts can be carried out adequately and adequately. 3) The internal cash control procedures at PT Pos Indonesia (Persero) Bone Branch are quite adequate, because the implementation of the procedure itself is based on a guidebook made by PT Pos Indonesia (Persero) Bone Branch regarding official regulations, namely cash management at the PT Pos Indonesia (Persero) Bone Branch office is carried out by the treasurer which is carried out every working day based on cash receipts that occur. 4) In the authorization and recording system carried out by PT Pos Indonesia (Persero) Bone Branch is still running poorly, this is shown by the existence of several documents that have not been stamped in full.

ABSTRAK

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian Intern penerimaan kas pada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. Hasil penelitian 1) Prosedur penerimaan kas pada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone cukup baik, terlihat dari setiap terjadinya transaksi

segera dilakukan pembukuan. 2) Upaya pengendalian intern kas dapat dilakukan cukup layak dan memadai. 3) Prosedur pengendalian intern kas yang ada pada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone cukup memadai, karena pelaksanaan prosedur itu sendiri berdasarkan buku pedoman yang dibuat oleh PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone tentang peraturan dinas yaitu pengelolaan kas di kantor PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone dilaksanakan oleh bendahara yang dilakukan setiap hari kerja berdasarkan penerimaan kas yang terjadi. 4) Dalam sistem otorisasi dan pencatatan yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone masih berjalan kurang baik, hal ini ditunjukkan oleh masih adanya beberapa dokumen yang belum dibubuhi cap lunas.

PENDAHULUAN

Sistem pengendalian intern bukanlah sebuah sistem yang dimaksudkan untuk menghindari semua kemungkinan terjadi kesalahan ataupun penyelewengan yang terjadi. Sistem pengendalian intern yang baik adalah dimana sebuah perusahaan dapat menekan terjadinya kesalahan dan penyimpangan yang mungkin terjadi. Fungsi pengendalian yang baik dengan berlandaskan pada sistem manajemen dan keuangan yang baik pula akan menciptakan aktivitas dalam perusahaan menjadi lancar dan terkendali

Untuk menghindari terjadinya penyelewengan maka sudah seharusnya perusahaan melakukan pengendalian intern yang memadai terhadap kas perusahaan. Suatu struktur organisasi yang memungkinkan pemisahan fungsi secara tepat dan sistem pemberian wewenang serta prosedur pencatatan yang layak merupakan beberapa contoh dari pengendalian intern yang memadai.

Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama perusahaan, yaitu penjualan kas dari penjualan kas dari piutang. Selain itu diperlukan perencanaan yang baik terhadap kas agar memudahkan manajemen untuk mengetahui sumber penerimaan kas dan merancang pengeluaran kas yang terkordiner. Sistem pengendalian intern kas berguna bagi manajer keuangan untuk menilai kinerja yang telah dicapai perusahaan.

Sistem pengendalian intern kas dirancang dengan baik terhadap struktur organisasi yang dalamnya terdapat pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi. Hal itu dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan seperti pemisahan fungsi operasional, yaitu pemisahan fungsi penyimpanan dengan fungsi pencatatan. Sistem pengendalian kas perusahaan, yang pada umumnya dapat dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen khususnya pengendalian intern kas. Sistem pengendalian intern kas yang lemah akan mengakibatkan kekayaan perusahaan tidak terjamin

keamanannya, informasi akuntansi tidak teliti dan tidak andal serta efisiensi tidak terjamin (Apriyani, 2015; Manoppo, 2013).

PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone dalam operasional perusahaan menerapkan sistem pengendalian intern kas perusahaan yang untuk menjaga pengelolaan kas terbatas dari penyelewengan atau penyalahgunaan. Sistem pengendalian intern kas diterapkan dengan beberapa prosedur yaitu dari pengajuan permintaan pembuatan setoran ke bank perusahaan oleh bank sampai dengan melakukan posting transaksi keuangan transaksi pembayaran.

PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone dalam operasionalnya hanya mempunyai standar operasional prosedur sistem pengendalian intern penerimaan kas, tetapi tidak untuk pengeluaran kas, oleh karena itu peneliti ini hanya melakukan analisis transaksi terhadap sistem pengendalian intern penerimaan kas saja (Sumurung & Ilat, 2015).

Adapun masalah yang penulis temukan yaitu masih ditemukan dalam catatan dokumen pendukung atau transaksi penerimaan kas berupa bukti pembayaran rekening air dan lampu yang belum di cap "Lunas" oleh bagian keuangan perusahaan. Bentuk prosedur pengendalian intern pada penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi penerimaan kas dengan cara membubuhkan cap "Lunas" pada faktur penjualan tunai dan menempelkan pita register. Hal ini di khawatirkan akan memberikan kesalahan komunikasi terhadap pelanggan dan kasir setelah terjadinya pembayaran atas transaksi tersebut (Andriana, 2015).

Masalah lainnya kantor pos tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang yang telah dikirim oleh pelanggan. Menetapkan tanggung jawab pengelolaan dan pengawasan fisik suatu. Hal ini di khawatirkan terjadinya kekecewaan pelanggan (Mulyadi, 2001; Quick, Turley, & Willekens, 2008; Rahman, 2014).

Berdasarkan kondisi latar belakang yang telah diuraikan diatas tentang perusahaan tersebut, maka peneliti tertarik untuk menguji berapa pentingnya sistem pengendalian intern kas di PT. Pos Indonesia

(Persero) Cabang Bone sebagai karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas pada PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Sistem pengendalian Intern

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Dalam suatu perusahaan, pengendalian *intern* mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dimana suatu pengendalian *intern* yang baik. Suatu perusahaan akan selalu dapat mengawasi jalannya operasi dalam pengalaman pembuktian bahwa struktur pengendalian yang baik merupakan suatu langkah yang dapat mengarahkan suatu aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pentingnya sistem pengendalian *intern* pada perusahaan saat ini memang sangat membantu dalam mengantisipasi terjadinya penyelewengan atau kecurangan sehubungan dengan aktivitas operasi perusahaan. Banyak para ahli akuntansi memberikan pendapat terhadap sistem pengendalian *intern* sesuai dengan persepsi yang diketahui pada ahli tersebut, berikut ini akan disajikan pengertian sistem pengendalian *intern* dari beberapa ahli (Santi & Surya, 2013).

Menurut Hery (2008, hal 156) mendefinisikan sebagai berikut: Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aktiva atau kekayaan perusahaan dari segala penyalahgunaan, manajemen tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan dipatuhi atau dijadikan sebagaimana mestinya oleh seluruh kariawan perusahaan.

Menurut Mulyadi (2001, hal 163) menyatakan bahwa sistem pengendalian *intern* meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang koordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Rachmat, Afandi, et al., 2023; Rachmat et al., n.d.; Wahyuddin & Rachmat, 2023).

Menurut *committee of sponsoring organization* (COSO) dalam buku Audit Sistem Informasi (201, hal 2006) mendefinisikan bahwa:

Pengendalian *intern* adalah proses yang diimplementasikan dewan komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang berada di bawah arahan keduanya, untuk memberikan jaminan yang wajar bahwatujuan pengendalian dicapai dengan pertimbangan hal-hal berikut: efektivitas dan efisiensi operasional organisasi, keandalan

pelaporan keuangan dan pelaporan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Terdapat beberapa konsep dasar mengenai pengendalian *intern*.

Jadi dari beberapa definisi maka dapat kita simpulkan pengertian Pengendalian *intern* adalah: “suatu usaha atau sistem sosial yang dilakukan perusahaan yang terdiri struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalan perusahaan agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program perusahaan serta mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen”.

b. Pentingnya Pengendalian Internal

Pentingnya pengendalian internal bagi perusahaan di pengaruhi oleh struktur pengendalian internal pada perusahaan meliputi:

- 1) Luas dan ukuran entitas perusahaan yang sangat kompleks. Hal ini mengakibatkan manajemen harus percaya pada laporan-laporan serta analisis-analisis untuk operasi pengendalian yang efektif.
- 2) Pengecekan dan penelaahan melekat pada sistem pengendalian *intern* yang baik hal ini mempunyai arti bahwa sistem pengendalian *intern* mampu mencegah kelemahan manusia yang mengurangi kemampuan kesalahan dan penyimpangan yang terjadi.
- 3) Sistem pengendalian *intern* dapat di praktekkan oleh akuntansi pemeriksaan untuk mengaudit perusahaan dengan biaya yang telah terbatas.

Bagi perusahaan, sistem pengendalian *intern* dapat digunakan lebih efektif untuk mencegah penggelapan atau penyimpangan. Dengan kata lain, memberikan kepastian bahwa penggelapan atau penyimpangan laporan keuangan dapat mencegah atau “subjek deteksi awal” (Nindita, 2009).

c. Prosedur pengendalian Intern

Menurut Hery (2008 hal.158) perusahaan memerlukan prosedur pengendalian *intern* berikut:

- 1) Penetapan Tanggung Jawab
Penetapan tanggung jawab disini agar supaya masing-masing karyawan dapat bekerja sesuai dengan tugas-tugas tertentu (secara spesifik) yang telah dipercayai kepadanya.
- 2) Pemisahan Tugas
Pemisahan fungsi yang memiliki dua bentuk paling umum yang pertama bekerja yang berbeda yang seharusnya dikerjakan oleh karyawan yang berbeda pula
- 3) Dokumentasi
Dokumen memberikan bukti bahwa transaksi bisnis atau peristiwa ekonomi yang terjadi,

dengan membutuhkan atau memberikan tanda tangan kedalam dokumen.

- 4) Pengendalian Fisik, Mekanis, dan Elektronik
Penggunaan penggunaan fisik, mekani dan elektronik sangatlah penting terutama terkait dengan pengamanan aktiva.
- 5) Pencetakan Independen atau Verifikasi Internal
Pengendalian internal memberikan pengecekan independen atau verifikasi internal. Verifikasi internal dilakukan secara periodik/berkala atau bisa juga dilakukan akan dasar dadakan, verifikasi dilakukan oleh seseorang independen/ketidak sesuaian kecuali harus dilaporkan ketingkat manajemen yang memang dapat mengambil tindakan secara cepat (Dasar, 2011; Indonesia, 2016).

2. Kas

a. Pengertian Kas

Kas merupakan aktiva yang paling likuid dan juga merupakan salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya. Kas memiliki sifat universal yaitu memiliki ukuran dan bentuk yang sama, sehingga kas merupakan aktiva yang mudah untuk diselewengkan. Kas juga harus dijaga agar tidak ada saldo kas yang berlebihan yang sering disebut sebagai kas tidak dapat terpakai atau kas menganggur (*Idle cash*).

Dari segi akuntansi yang disebut dengan kas menurut soemarso (2004: hal. 320) adalah “segala sesuatu yang disebut dengan uang atau bukan, yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya”. Sehingga kas sering digunakan untuk membiayai operasional perusahaan (Rachmat, Pandowo, et al., 2023; Wiratna, 2015).

Kas dan setara kas menurut PSAK No. 2 (IAI: 2009: 2) “kas terdiri dari saldo (*cash on hand*) dan rekening giro. Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dengan cepat dapat dijadikan sebagai kas dalam jumlah tertentu menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan” (Tunggal, 2013).

Dari beberapa pengertian kas diatas maka dapat disimpulkan bahwa kas merupakan aktiva lancar perusahaan yang siap digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Selain itu kas juga dapat dengan mudah diselewengkan sehingga harus dijaga agar tidak terjadi kas menganggur atau sering disebut dengan *Idle Cash*.

b. Fungsi Kas

Menurut Rannita (2013 hal: 123) Kas adalah aktiva yang tidak produktif oleh karena itu harus dijaga sebaik mungkin, agar jumlah kas tidak terlalu besar sehingga tidak ada uang kas yang

menganggur. Kas juga juga menjadi begitu penting karena merupakan komponen aktiva yang paling aktif dan sangat mempengaruhi setiap transaksi yang terjadi. Hal ini dikarenakan setiap transaksi yang terjadi. Hal ini dikarenakan setiap transaksi memerlukan suatu dasar pengakuan yaitu kas. Walaupun perkiraan kas tidak langsung terlibat dalam transaksi tersebut, besarnya nilai transaksi tetap diukur dengan kas (Arikunto, 1998; Rachmat et al., n.d.; Santoso, 2000).

3. Sistem Pengendalian Intern Kas

Sistem pengendalian intern kas dibagi menjadi dua sistem, yaitu pengendalian intern pada penerimaan kas dan pengendalian intern pada pengeluaran kas.

a. Sistem Pengendalian Intern penerimaan kas

Unsur-unsur sistem pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem penerimaan kas menurut Mulyadi (2001: hal. 470-474) adalah:

1) Organisasi

a) Fungsi penjualan Harus Terpisah dari Fungsi Kas

Pemisahan ini mengakibatkan setiap penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan oleh dua fungsi yang saling mengecek.

b) Fungsi Kas Harus dari Fungsi Akuntansi

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kekayaan perusahaan dan menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan kata lain suatu sistem menggabungkan fungsi akuntansi dengan kedua fungsi pokok yang lain (fungsi operasi dan fungsi penyimpanan) akan membuka kesempatan bagi karyawan perusahaan untuk melakukan kecenderungan dengan mengubah catatan akuntansi untuk menutupi kecurangan yang dilakukannya.

c) Transaksi penjualan tunai harus dilakukan oleh fungsi Penjualan, fungsi kas, fungsi akuntansi. Dengan dilakukannya setiap transaksi penjualan tunai oleh berbagai fungsi tersebut akan tercipta adanya pengecekan intern pekerjaan setiap fungsi tersebut oleh fungsi lainnya (Baridwan, 1985).

2) Sistem Otoritas dan Prosedur Pencatatan

a) Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Faktur penjualan tunai harus diotorisasi oleh fungsi penjualan agar menjadi dokumen yang sah, yang dapat dipakai sebagai dasar bagi fungsi penerimaan kas untuk menerima kas dari

pembeli, dan menjadi perintah bagi fungsi pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli setelah harga barang dibayar oleh pembeli tersebut, serta sebagai dokumen sumber untuk pencatatan dalam catatan akuntansi.

- b) Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi penerimaan kas dengan cara membutuhkan cap “Lunas” dan pada faktur penjualan tunai dan menempelkan pita register kas pada faktur tersebut.
- c) Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Dalam sistem yang online, merchant dilengkapi dengan suatu alat yang dihubungkan secara online dengan komputer bank penerbit kartu kredit.
- d) Penyerahan batang oleh fungsi pengiriman dengan cara membutuhkan cap “sudah diserahkan” pada faktur penjualan tunai. Dengan bukti ini fungsi akuntansi telah memperoleh bukti yang sah untuk mencatat adanya transaksi penjualan tunai dengan mendebit rekening kas dan mendebit rekening hasil penjualan dan persediaan barang.
- e) Pencatatan ke dalam akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampirkan dengan dokumen pendukung yang lengkap. Keaslian dokumen sumber dibuktikan dengan dilampirkannya dokumen pendukung yang lengkap, yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.
- f) Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk itu. Dengan cara ini maka tanggung jawab atas perubahan catatan akuntansi dapat dibebankan kepada karyawan tertentu, sehingga tidak ada satupun perubahan data yang dicantumkan dalam catatan akuntansi yang tidak dipertanggung jawabkan.

b. Prosedur Penerimaan Kas

Penerimaan kas dalam perusahaan pada umumnya berasal dari penjualan tunai dan dari penerimaan pembayaran piutang dari debitur. Prosedur penerimaan kas yang diterapkan oleh suatu perusahaan sangat tergantung kepada besar kecilnya perusahaan serta struktur organisasi perusahaan itu sendiri. Sebagai ilustrasi kami perlihatkan prosedur penerimaan kas dari penjualan sebagai berikut:

- 1) Prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai

Penjualan tunai yang dimaksud disini, pembeli datang ke perusahaan melakukan pemilihan barang atau produk yang dibeli, melakukan pembayaran dengan uang tunai ke kasir dan menerima barang yang dibeli. Penerimaan kas dari penjualan tunai dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut :

- a) Pembeli memesan langsung barang langsung kepada wiraniaga di bagian penjualan.
- b) Bagian kasa menerima pembayaran dari pembeli
- c) Bagian penjualan memerintahkan bagian pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli.
- d) Bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli.
- e) Bagian kasa menyetor kas yang diterima ke bank
- f) Bagian jurnal mencatat penerimaan kas dalam jurnal penerimaan kas (Sartini et al., 2023).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.

Objek dalam penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas yang ada di PT Pos Indonesia (Persero) Kabupaten Bone.

Adapun jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa penjelasan dan pernyataan yang tidak berbentuk angka-angka. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah:

- Data primer, yaitu data yang diperoleh oleh langsung peneliti melalui teknik wawancara dengan bagian keuangan yang ada di perusahaan.
- Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi, seperti voucher penerimaan kas.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasi data, menjelaskan, dan menganalisis data sehingga

memberikan informasi dan gambaran tentang variabel yang diteliti.

Hal ini digunakan untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian intern kas yang dijelaskan dan apakah ada perbaikan dan penyempurnaan yang harus dilakukan.

Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan observasi pada kantor PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone
- b. Mengumpulkan data dari kantor PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone
- c. Mempelajari atau mengidentifikasi data yang diperoleh.
- d. Memberi analisis dan kesimpulan atas data yang diperoleh dari PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sistem pengendalin intern penerimaan kas, prosedur penerimaan merupakan salah satu unsur yang ditetapkan oleh PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone. Tujuan dari penyelenggaraan sistem pengendalian intern penerimaan kas adalah untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan perusahaan. Oleh karena itu semua bukti asli tersebut digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi.

Prosedur penerimaan kas pada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone merupakan urutan kegiatan yang melibatkan beberapa fungsi yang ada di PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone. Dalam prosedur penerimaan kas ini akan terlihat hubungan antara fungsi-fungsi serta wewenang setiap organisasi. Sehingga kekayaan organisasi dapat terjaga dengan baik.

Sistem pengendalian intern penerimaan kas telah dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone dengan tujuan untuk menyajikan informasi penerimaan yang dilaporkan baik pada laporan harian amupun laporan bulanan sehingga dapat dipercaya pencatatannya dan mendorong karyawan menjalankan tugasnya dengan baik.

Dalam struktur organisasi, seharusnya pemisahan tanggung jawab fungsional secara tegas mutlak harus dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone. Hal ini dikarenakan pemisahan fungsi akan sangat membantu PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone dalam menjaga dan mengamankan harta kekayaan perusahaan dari hal yang merugikan perusahaan serta kelangsungan hidup perusahaan.

Dalam sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang baik adalah unsur sistem pengendalin intern penerimaan kas yang akan sangat membantu perusahaan. Karena dengan adanya

sistem otorisasi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan maka kekayaan organisasi akan terjaga keamanannya. Dan hal ini akan sangat mmbantu PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone dalam tanggungjawaban data – data akuntansi perusahaan.

Pada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan perusahaan menggunakan formulir sebaai bukti kas masuk untuk mencatat transaksi pada saat terjadinya penerimaan kas. Penggunaan formulir tersebut berguna sebagai alat perekam transaksi yang terjadi di PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone. Pada sistem otorisasi harus ditetapkan pada semua bukti kas masuk atau bukti tnaskasi berupa persetujuan dari pihak yang berwenang.

Namun faktanya pada sistem otorisasi perusahaan belum menjalankan prosedur penerimaan kas dengan baik hal ini dibuktikan masih adanya bukti penerimaan kas yang tidak mendapat otorisasi terlebih daultu namum tetap dicatat didalam laporan harian penerimaan kas PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone, dengan adanya kondisi ini kas yang diterima tanpa adanya persetujuan pihak yang berwenang akan membuka kesempatan penyelewangan kas yang akan merugikan perusahaan.

Jika PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone ingin harta kekayaan perusahaan terjaga keamanannya maka unsur-unsur sistem pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran yang efektif dan efisien mutlak diperlukan oleh perusahaan salah satunya adalah praktik yag sehat. Pada praktik yang sehat pembubuhan cap “Lunas” wajib dilakukan perusahaan.

Prosedur pengendalian intern penerimaan kas merupakan unsur yang sangat diperlukan bagi perusahaan. Sistem pengendalian intern PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone telah menerapkan unsur-unsur sistem pengendalian penerimaan kas, yaitu struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat, serta karyawan yang bertanggungjawab. Oleh karena itu peneliti telah melakukan wawancara kepada pihak perusahaan tentang bagaimana penerapan sistem pengendalian intern penerimaan kas adalah sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi

Mengenai struktur organisasi pada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone sudah berjalan dengan baik. Struktur organisasi pada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone sudah menerapkan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing- masing pegawai seperti pemisahan antara bagian pemegang kas (kasir) dengan bagian akuntansi. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa data kekayaan perusahaan telah terjamin ketelitian serta keandalan data akuntansi pada perusahaan.

2. Sistem otorisasi dan proses pencatatan

Penerapan sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang dijalankan oleh PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone masih kurang baik, dalam praktik masih ditemukan formulir bukti penerimaan kas atas dokumen pendukung transaksi penjualan seperti pembayaran air, pembayaran lampu yang belum dibubuhi cap “Lunas” oleh bagian loket dalam perusahaan. Hal ini menimbulkan pencatatan kembali oleh pegawai yang tidak bertanggung jawab dan dapat mengakibatkan komunikasi yang salah antara pihak PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone dengan pelanggan.

Kantor PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone dalam melakukan pencatatan akuntansi telah didasarkan pada dokumen sumber dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang sudah lengkap. Namun kantor PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone tidak melakukan pertanggung jawaban atas kerusakan barang yang dikirim. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Baridwan (2009:158) menetapkan tanggung jawab pengelolaan dan pengawasan fisik suatu barang kepada perusahaan. Yang mengakibatkan kekecewaan terhadap pelanggan.

3. Praktik yang sehat

Hasil dari penelitian nomer 6-8 berdasarkan pernyataan yang ada pada lembar wawancara mengenai praktik yang sehat yang PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone sudah baik, penyeteroran penerimaan kas ke bank dilakukan pada hari yang sama, kas perusahaan yang diterima kasir atau pemegang kas dalam satu hari kerja dikumpulkan dan disetor pada sore hari saat aktifitas transaksi tunai dalam perusahaan tutup beroperasi, hal ini dilakukan agar seluruh saldo kas dalam kasir sudah benar benar disetorkan ke bank sehingga tidak terdapat *idle cash* ditangan kasir.

Faktur penjualan tunai yang dikeluarkan oleh kantor PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone sudah menggunakan nomer urut bercetak dan pemakaiannya dipertanggung jawabkan oleh fungsi penjualan. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan pertanyaan nomer 8, dari hasil wawancara kantor Pos perhitungan saldo kas yang ada ditangan fungsi kas sudah dilakukan pemeriksaan secara mendadak oleh fungsi pengendalian intern.

4. Karyawan yang bertanggungjawab

Dari hasil wawancara tersebut maka kantor PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone sudah memenuhi kriteria karyawan yang bertanggungjawab, hal ini sesuai dengan (Mulyadi : 170) jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Karyawan yang jujur dan ahli dalam

bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat dilaksanakan pekerjaannya dengan efisien dan efektif.

5. Sistem dokumentasi dan otorisasinya.

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari pendapatan pengiriman paket pos PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone adalah sebagai berikut:

a. Tanda Terima Kiriman Paket

Merupakan bukti telah terjadi pengiriman paket yang dibuat oleh petugas loket yang berisi nomor paket pos, kantor pos asal, nama dan alamat pengirim serta nama dan alamat penerima, keterangan mengenai isi paket, ukuran dan berat, biaya pengiriman, kantor pos tujuan, tanda tangan pengirim dan tanggal. Tanda terima ini dibuat rangkap 3, lembar pertama untuk kantor tujuan, lembar kedua untuk pengirim dan lembar ke tiga sebagai dokumen di kantor pos.

b. Neraca Loket

Dibuat oleh petugas loket yang merupakan daftar total penerimaan kas yang didapat dari pengiriman paket pos.

c. Backsheet

Adalah daftar yang dibuat petugas loket yang berisi nomor tanda terima kiriman paket pos, nama dan alamat pengirim, nama dan alamat penerima serta biaya yang ditanggung.

d. Neraca Kasir

Dibuat oleh kasir yang berisi tentang penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di bagian kasir yang kemudian akan diserahkan ke bagian akuntansi.

e. Rekapitulasi Neraca Loket

Dibuat oleh supervisor pelayanan setelah mencocokkan neraca loket dan backsheet yang dibuat oleh petugas loket dan akan diserahkan ke bagian akuntansi.

KESIMPULAN

1. Prosedur penerimaan kas pada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone cukup baik, terlihat dari setiap terjadinya transaksi segera dilakukan pembukuan. Setiap harinya kas yang diterima segera dilakukan pembukuan. Setiap harinya kas yang diterima segera disetor kepada bank pemerintah yang ditunjuk.
2. Upaya pengendalian intern kas dapat dilakukan cukup layak dan memadai. Hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan-kegiatan dalam usaha menggunakan kas yang didukung dengan adanya laporan-laporan dan dokumen-dokumen petunjuk lainnya. Kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Adanya struktur organisasi yang baik yang menggambarkan pemisahan wewenang,

fungsi serta tugas secara jelas sehingga menciptakan pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien.

- b. Adanya sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang cukup layak dan memadai untuk mengelola kantor pos tersebut. Dengan didukung oleh laporan-laporan penerimaan kas yang lengkap dan didistribusikan kepada bagian-bagian yang berwenang dalam usaha pelaksanaan evaluasi dan tindakan koreksi.
 - c. Adanya kualitas karyawan yang cukup berkualitas. Hal ini dapat terlihat dari penerimaan calon pegawai melalui seleksi penerimaan pegawai yang baik dilanjutkan dengan penelitian dan pelatihan yang dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone.
 - d. Pemeriksaan internal yang independen, dalam melakukan tugasnya satuan pengawasan internal tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak berwenang sehingga dapat menghasilkan pendapatan dan saran yang baik untuk tujuan perusahaan.
3. Prosedur pengendalian intern kas yang ada pada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone cukup memadai, karena pelaksanaan prosedur itu sendiri berdasarkan buku pedoman yang dibuat oleh PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone tentang peraturan dinas yaitu pengelolaan kas di kantor PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone dilaksanakan oleh bendahara yang dilakukan setiap hari kerja berdasarkan penerimaan kas yang terjadi.
 4. Dalam sistem otorisasi dan pencatatan yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bone masih berjalan kurang baik, hal ini ditunjukkan oleh masih adanya beberapa dokumen yang belum dibubuhi cap lunas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, A. (2015). *Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Lembaga Zakat (Studi Pada Lembaga Manajemen Infaq (Lmi) Cabang Magetan Jawa Timur)*. Brawijaya University.
- Apriyani, A. (2015). *Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Siklus Penjualan dan Penerimaan Kas pada PT. Thasima Daya Sentosa*. STIE Indonesia Banking School.
- Arikunto, S. (1998). *Pendekatan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baridwan, Z. (1985). *Sistem Akuntansi: Penyusunan Prosedur dan Metode*.
- Dasar, K. K. (2011). *Sistem informasi akuntansi. Konsep-Konsep Dasar Sistem Informasi Akuntansi*, 3(1), 1–32.
- Indonesia, I. A. (2016). *Standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 33.
- Manoppo, R. M. (2013). Analisis sistem pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. Sinar Galesong Prima Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4).
- Mulyadi, S. (2001). *Sistem akuntansi edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Quick, R., Turley, S., & Willekens, M. (2008). *Auditing, Trust and Governance*. Routledge.
- Rachmat, Z., Afandi, A., Amalia, A., Widyaningrum, S., Nurendah, Y., Hamidah, N. K., ... Sudirjo, F. (2023). *Pengantar bisnis*. Global Eksekutif Teknologi.
- Rachmat, Z., Baali, Y., Rukmana, A. Y., Wonua, A. R., Sudirjo, F., Handiman, U. T., ... Irawan, I. A. (n.d.). *Pengembangan Kewirausahaan*.
- Rachmat, Z., Pandowo, A., Rukmana, A. Y., Haryanti, I., Sasongko, D. B., Nugraha, J. P., ... Salam, R. (2023). *Digital marketing dan E-commerce*. Global Eksekutif Teknologi.
- Rahman, Y. (2014). *Analisis Sistem Dan Prosedur Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pada UD. Sumber Makiah Loktabat Banjarbaru*. Kindai.
- Santi, E., & Surya, F. (2013). Analisis Pengendalian Intern Pada Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas di Politeknik Negeri Padang. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 8(2), 35–44.
- Santoso, R. T. (2000). *Dasar-dasar Akuntansi 2. Edisi Kelima*. Yogyakarta: Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Sartini, R., Abdillah, P., Sudirman, R., Azwar, K., Priyadi, I. H., Wardhani, R. S., ... Setiawati, L. P. E. (2023). *Akuntansi forensik*. Tohar Media.
- Sumurung, M. C. P., & Ilat, V. (2015). Analisis Pengendalian Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT. Manado Media Grafika. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4).
- Tunggal, A. (2013). *Pokok-Pokok Coso-Based Auditing*. Jakarta: Harvarindo.
- Wahyuddin, S., & Rachmat, Z. (2023). The influence of modernization of tax administration and organizational culture on tax revenues through taxpayer motivation. *Journal of Contemporary Accounting*, 5(2).
- Wiratna, S. V. (2015). *Sistem Akuntansi. Cetakan Pertama*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.